



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

**PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUN**



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 5 Januari 2026
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001


ERIKA SARI EMSAH GINTING S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
(P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100 %
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	87%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	40 %
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	70%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
		l. Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang dutetapkan	3.97
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01 DIPA 03	95% 95%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	85% 82%
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.	3%

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01		
1. Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi	(Lima milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Rp 5.960.723.000,-
DIPA 03		
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	(Dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)	Rp 229.714.000,-
JUMLAH		Rp 6.190.437.000,- (Enam milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

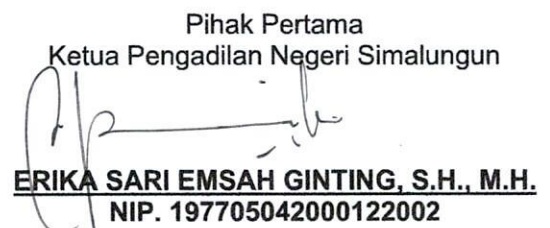
Simalungun, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Medan



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002

PERJANJIAN KIERJA TAHUN 2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)



KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 10/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/II/2026

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu ditetapkan Perjanjian Kerja Tahunan (PKT) Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;

Surat...

9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Perjanjian Kerja Tahunan (PKT) Tahun 2026 Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana mana pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan serta evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 5 Februari 2026

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 10/KPN/SK.OT1.6/II/2026
Tanggal : 5 Februari 2026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
(P K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentasi penyelesaian perkara tepat waktu	94%
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	87 %
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	40%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	70%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
		1.12 Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3.97
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	95% 95%
		3.3 Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 DIPA 03	85% 82%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3%

No	Program		Anggaran
1	DIPA 01		
	Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi		Rp 5.960.723.000,- (Lima milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
2	DIPA 03		
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp 229.714.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)
	JUMLAH		Rp 6.190.437.000,- (Enam milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)



KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

PERJANJIAN KIERJA TAHUN 2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)